BAB IV

ANALISA DAN USULAN HASIL PENELITIAN

4.1 Analisa Hasil Penelitian

Selama dalam penelitian ini Penulis dapat menganalisa beberapa data yang bisa diambil untuk dijadikan sebagai bahan untuk tugas akhir ini sesuai dengan judul yang ada yaitu menganalisa tentang Penatausahan SPT Masa PPh Pasal 21 terhadap Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara.

4.1.1 Analisa Penatausahaan SPT Masa

Berdasarkan pengamatan selama melakukan penelitian Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara, peranan Penatausahaan SPT Masa PPh Pasal 21 ternyata memerlukan perhatian yang khusus artinya dengan adanya penatausahaan yang baik berarti tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat terlihat dengan sendirinya pada setiap masa pajak.

Setiap Wajib Pajak mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa yang benar, lengkap, jelas dan menandatanganinya, Surat pemberitahuan Masa harus ditandatangani oleh pengurus atau Direksi apabila diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan oleh Wajib Pajak maka harus dilampiri Surat Kuasa khusus.

Dengan uraian dibawah ini lebih mudah untuk bisa menganalisa secara terperinci:

1. Kasubsi PPM Pemotongan PPh menerima Register Harian Penerimaan SPT Masa dari Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), memaraf dan selanjutnya meneruskan kepada Petugas Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh untuk dicatat ke dalam Buku Register Harian penerimaan Surat Pemberitahuan Masa (data otomisasi penerimaan).
2. Setiap satu bulan sekali Buku Register Harian Penerimaan SPT Masa diparaf dan ditutup oleh Kasubsi PPM Pemotongan dan Pemungutan PPh.
3. Petugas Buku Register Harian Penerimaan SPT Masa menyortir SPT Masa tersebut sesuai urutan NPWP dan meneruskan kepada petugas Operator / Tabelaris.
4. Petugas Operator atau Tabelaris menerima, meneliti SPT Masa tersebut dan merekam ke dalam SIP dan meneruskan SPT Masa tersebut kepada Petugas Berkas Tahun Berjalan. Petugas Operator/Tabelaris PPh secara periodik meneliti dan mencetak Tabelaris PPh terhadap Wajib Pajak:
   - Yang tidak membayar dan atau tidak melapor, dibuatkan daftar untuk diperingatkan dengan Surat Pemberitahuan.
   - Yang tidak membayar dan atau tidak melapor, untuk dibuatkan Daftar yang akan dikeluarkan STP PPh Pasal 21.
   - Yang tidak membayar dan atau tidak melapor selama 6 (enam) bulan berturut-turut, untuk dibuatkan Daftar Usulan Pemeriksaan Sederhana Lapangan / pemeriksaan khusus.
   - Yang setiap saat mencatat mutasi, status dan perubahan besarnya setoran masa PPh Pasal 21 dari Wajib Pajak.

Dan meneruskan print out /hasil cetakan tersebut kepada Kasubsi PPM Pemotongan dan Pemungutan PPh.

5. Petugas Berkas Tahun Berjalan menerima, meneliti SPT Masa tersebut dan memasukan kedalam berkas menurut NPWP.

Dalam penatausahaan SPT Masa di KPP Bandung Bojonagara sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, terlihat dari peningkatan prosentase tingkat kepatuhan yang dipengaruhi oleh peranan penatusahaan yang cukup baik.

Namun dalam penatausahan SPT Masa jika ada salah satu bagian tidak melakukan tugasnya itu maka untuk bagian yang seharusnya menerima laporan tersebut juga tidak bisa meneruskan tugasnya itu ke bagian lainnya yang berhubungan dengan bagian yang sebelumnya.

4.1.2 Analisa Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan melihat dari data tingkat Kepatuhan Wajib Pajak maka penulis dapat menganalisa dari bulan Januari sampai dengan Maret, bagaimana perkembangan yang terjadi pada tahun 2000.

Dilihat dari prosentase kepatuhan bulan Januari ke bulan Frebuari yaitu sebesar 0,9%, bulan Februari ke bulan Maret sebesar 3,7%. Dengan demikian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bojonagara Bandung bisa dikatakan baik dalam penatausahaan SPT Masanya, jika dilihat dengan mengevaluasi sampai dengan bulan Maret Tahun 2000 ini.

Prosentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang diharapkan oleh Kantor Pajak adalah 100%(seratus persen). sedangkan kenyataannya kurang dari yang diharapkan. Kekurangannya itu diakibatkan oleh keterlambatan Wajib Pajak melapor dan tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

4.1.3 Analisa Peranan Penatausahaan SPT Masa Pasal 21 terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Bandung Bojonagara

Penatausahaan SPT Masa sangat berperan dalam upaya menganalisa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Bandung Bojonagara Setiap satu bulan sekali Buku Register Harian penerimaan SPT Masa diparaf dan ditutup oleh Kasubsi PPM Pemotongan dan Pemungutan PPh, setelah itu petugas Buku Register Harian Penerimaan SPT Masa menyortir SPT Masa tersebut sesuai dengan urutan NPWP, dan meneruskan kepada petugas Operataor / Tabelaris. Sehingga dapat diketahui prosentase tingkat kepatuhan pada setiap masa pajak dengan melihat berapa Wajib Pajak terdaftar efektif, SPT Masa yang diterima, dan dengan data tersebut dapat dihitung presentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam Penatusahan SPT Masa apabila petugasnya ada yang lalai menjalankan tugasnya maka penatausahaan ini kurang berperan dalam melihat tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dilihat dari Wajib Pajaknya juga yang kesadarannya kurang untuk melapor dan membayar pajak tidak akan membantu dalam peranan penatausahaan SPT Masa tersebut.

4.2 Usulan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis mencoba memberikan usulan terhadap data-data yang telah dianalisa pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara, lebih jelasnya akan diuraikan dibawah ini.

4.2.1 Usulan Terhadap Penatausahaan SPT Masa PPh Pasal 21.

Dalam hal ini penulis mengusulkan kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara agar dalam penatausahaannya lebih ditingkatkan khususnya di seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh, tidak ada lagi pegawai yang lalai dalam melakukan tugasnya. Sehingga dengan penatausahaan yang lebih baik, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada setiap masa pajak tersebut mengalami peningkatan.

4.2.2 Usulan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Bandung Bojonegara

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak ini bisa memang bisa dilihat dari penatausahaan SPT Masa tapi disisi lain tetap kepatuhan ini hanya dari kesadaran Wajib Pajak itu sendiri, seberapa kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak maka, penulis mengusulkan khususnya bagi Wajib Pajak agar lebih meningkatkan kesadarannya dalam melapor dan membayar pajak.

4.2.3 Usulan terhadap Peranan Penatausahaan SPT Masa PPh Pasal 21 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Bandung

Peranan Penatausahaan SPT Masa khususnya di seksi Pemotongan dan Pemungutan agar lebih ditingkatkan, serta kepada Wajib Pajak agar meningkatkan kesadarannya dalam melapor dan membayar pajak. Dalam tingkat kepatuhan Wajib Pajak itu tergantung dari penatausahaannya serta kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga peranan penatausahan SPT Masa sangat mempengaruhi terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.